

Submitted: 28 April 2023	Accepted: 18 September 2023	Published: 30 Januari 2024
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

Dialektika Ideologi Tanah dalam Konflik Porto-Haria

Handry*; Jozef M.N. Hehanussa; Paulus Sugeng Widjaya; Wahyu Nugroho

Program Pascasarjana Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

*handryteol@gmail.com**

Abstract

Frequent land conflicts are often unconsiderly triggered by ideological differences. This is also what can be felt in the land conflict between the Porto and Haria communities. Therefore, this research aimed to clearly take to surface these ideological motifs by utilizing the categorization of land ideology in the Old Testament proposed by Norman C. Habel. The results of this study showed that the two conflicting societies each have an ideology that also can be found in the land ideology in the Old Testament, namely the ideology of kingship and the ideology of the ancestors. Therefore, to mediate the conflict, it is necessary to offer another ideology that does not put pressure on land ownership claims, namely the ideology of prophethood.

Keywords: *dialectic; land conflict; land ideology; Norman C. Habel; reconciliation*

Abstrak

Konflik tanah yang sering dijumpai seringkali tanpa disadari dipicu oleh adanya perbedaan ideologi. Hal itu jugalah yang dapat dirasakan dalam konflik tanah masyarakat Porto-Haria. Oleh karena itu, kajian ini bermaksud untuk menampilkan secara jelas ke permukaan motif-motif ideologis tersebut dengan memanfaatkan kategorisasi ideologi tanah dalam Perjanjian Lama yang dikemukakan oleh Norman C. Habel. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kedua masyarakat yang berkonflik masing-masing memiliki ideologi yang mirip dengan ideologi tanah dalam Perjanjian Lama, yaitu ideologi kerajaan dan ideologi nenek moyang. Oleh karena itu untuk menengahi konflik tersebut perlu ditawarkan ideologi lainnya yang tidak menekankan pada klaim kepemilikan tanah, yaitu ideologi kenabian.

Kata Kunci: *dialektika; ideologi tanah; konflik tanah; Norman C. Habel; rekonsiliasi*

PENDAHULUAN

Secara umum, konflik tanah atau *land grabbing* selalu terjadi di manapun. Dalam skala besar, konflik tanah terkadang melibatkan wilayah antar negara sekaligus memicu peperangan secara masif. Begitupun dengan konflik tanah dalam skala sedang maupun kecil. Apapun skala konflik tanah, pada prinsipnya kondisi tersebut selalu meninggalkan kerugian sekaligus penderitaan yang mendalam.

Konflik tanah dalam konteks masyarakat di Indonesia sering tering, termasuk masyarakat di Provinsi Maluku. Konflik antar dua wilayah, yakni Porto dan Haria di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, hingga kini menjadi konflik yang populer di Maluku. Sebagian besar masyarakat di Maluku setuju bahwa konflik dipicu karena pelbagai aspek. Diduga aspek pertanahan menjadi alasan yang kuat, mengapa konflik antara dua wilayah terus terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, konflik yang terjadi di sana telah meninggalkan luka, derita, ingatan kebencian bahkan penderitaan yang mendalam dari kedua wilayah.

Sederhananya, peristiwa konflik yang berkepanjangan di kedua wilayah, yakni Porto-Haria yang terjadi dipicu oleh perebutan tanah *dati Hatuwasalo*, tanah dati

yang berada persis di antara wilayah administratif kedua wilayah. Dalam dialektika konflik berbasis tanah *dati* berbagai pihak yang terlibat menegaskan sudut pandangnya (saya kategorikan istilah “sudut pandang” sebagai ideologi) baik dari sisi sosiologis, antropologis, historis, hingga teologis dalam rangka mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari berbagai pihak, dengan tujuan dapat menguasai tanah tersebut.

Norman Habel, dalam bukunya “*The Land Is Mine*,” menjelaskan bahwa paling sedikit ada enam ideologi tentang tanah dalam masa Israel kuno dengan spesifikasinya masing-masing, yang pada titik tertentu bisa dijadikan sebagai *trigger* dalam sebuah peristiwa konflik komunal, baik dalam konteks masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.¹ Perdebatan dalam konteks tanah dalam sudut pandang kepelbedaan ideologi, mendorong saya untuk mencermati bahwa fenomena serta dialektika konflik tanah yang terjadi di Porto-Haria dapat ditinjau melalui ideologi tanah sebagaimana yang dikemukakan oleh Habel dengan menelusuri jejak Israel kuno dalam kaitannya dengan tanah. Ideologi yang digambarkan oleh Habel tentang tanah di Israel bisa juga berwajah sama dengan ideologi tanah dari Masyarakat Porto maupun Haria dan diyakini sebagai pemicu konflik selama ini.

¹ Norman C Habel, *The Land Is Mine: Six Biblical Land Ideologies* (Fortress Press, 1995), 8.

Hasil observasi awal ditemukan bahwa masing-masing wilayah “sebagai pemilik tanah” (keluarga Nanlohy dari Porto dan keluarga Loupatty dari Haria) memiliki sudut pandang mereka tentang kepemilikan tanah *dati hatuwasalo* yang berbeda-beda. Bagi keluarga Nanlohy, tanah *dati* Hatuwasalo seharusnya menjadi milik mereka karena status adat sebagai “tuan pati” bukan “tuan lattu.” Berbeda dengan pandang keluarga Nanlohy, keluarga Loupatty justru mengklaim bahwa tanah *dati hatuwasalo* merupakan milik mereka yang diberikan kepada keluarga Nanlohy ketika anak perempuan Loupatty menikah dengan anak laki-laki Nanlohy untuk dikelola demi menunjang kehidupan ekonomi. Perbedaan sudut pandang atas tanah *dati Hatuwasalo* di kemudian hari memunculkan gesekan di ruang publik dalam konflik komunal dan berlangsung selama lebih dari satu abad.

Pertanyaannya, mengapa konflik tersebut dapat bertahan hingga kini? Guna menjawab persoalan ini, ada dua hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan mengapa konflik berlangsung lama. Pertama, pertimbangan teologis. Dalam kajian ideologi tanah, Habel melihat bahwa masyarakat

hidup dengan beragam ideologi tentang tanah, dan keberagaman ideologi beririsan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, kesejarahan bahkan identitas suku maupun agama suatu komunitas masyarakat, yang daripadanya komunitas tersebut berusaha untuk mendominasi satu terhadap yang lain di ruang sosial.² Kedua, pertimbangan saintifik. Malik dalam Safithri mengemukakan tentang lima sumber utama konflik, yakni (1) sumber konflik struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari pemerintah pusat dan kepala daerah; (2) sumber konflik kepentingan yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan kepentingan dari budaya dominan; (3) sumber konflik nilai, berkaitan dengan persoalan adat, ideologi, dan interpretasi nilai agama; (4) konflik sosial psikologis berkaitan dengan persoalan mispersepsi, stereotipe, sikap negatif, dan persoalan identitas kelompok dan daerah; dan (5) konflik berbasis data. Hal ini berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi data, terutama terhadap data sejarah yang dikondisikan ulang.³

Mengacu pada pertimbangan dari Habel dan Malik, maka dapat dikatakan bah-

² Habel, 9.

³ Syamsuddin Anas, Susi Fitria Dewi, and Junaidi Indrawadi, “Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendetang Vs Masyarakat Adat Di

Desa Tamiai Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (October 18, 2019): 131–50, <https://doi.org/10.14421/JSR.V14I1.1702>.

wa aspek ideologi merupakan salah satu aspek dominan yang mendorong masyarakat terlibat konflik komunal dalam skala apapun dan dalam jangka waktu kapanpun. Dampaknya, perebutan tanah *dati hatuwasalo* antara Porto dan Haria disertai dialektika ideologi masing-masing. Secara gamblang terdapat perbedaan ideologi yang pada gilirannya digunakan untuk melegitimasi sekaligus mendiskreditkan satu sama lain. Inilah faktor yang mempertegas situasi konflik yang berkepanjangan antar kedua wilayah.

Berangkat dari pandangan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ideologi tanah menurut masyarakat Porto–Haria. Sadar maupun tidak, kedua wilayah telah mengaplikasikan beragam ideologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Habel dalam relasi sosial. Bukan tidak mungkin ideologi yang diterapkan dalam konteks Israel Kuno dengan berbagai kepelbedaan, kelebihan, dan kekurangannya juga dipraktikkan secara tanpa disadari oleh masyarakat Porto-Haria. Inilah yang memungkinkan konflik terus terjadi. Pada sisi lain, fakta bahwa dibalik ideologi Israel kuno tentu memiliki kepelbedaan, kelebihan dan kekurangannya ternyata memiliki makna positif yang bisa dieksplorasi sebagai jembatan untuk membangun titik temu dalam konteks konflik guna sebuah perdamaian.

Kendati demikian, saya berupaya untuk menggagas konsep ideologi kenabian dalam konteks Perjanjian Lama menurut Habel sebagai alternatif pemikiran. Hal ini saya ajukan mengingat enam konsep ideologi tanah dalam Perjanjian Lama yang dikemukakan Habel dengan beragam latar belakangnya, memungkinkan saya untuk memilih ideologi kenabian sebagai salah satu ideologi yang ideal untuk digagas sebagai pedoman umat dewasa ini (terutama bagi warga Porto-Haria) dalam menyikapi persoalan tanah *dati Hatuwasalo* yang tak kunjung selesai. Mengapa demikian? Habel mengungkapkan bahwa konsep ideologi kenabian tentang tanah seperti yang digambarkan dalam kitab Yeremia selain sangat mencerminkan sisi simbiosis antara tanah, orang Israel, dan Tuhan, juga sejarah ideologi (terutama) kenabian tentang tanah tidak hanya bicara soal simbiosis antara tanah Israel (umat) dan Tuhan semata, tetapi ideologi tentang tanah juga secara teknis ditelusuri bagaimana hubungan tersebut terjadi dan dampaknya, bagaimana peran masing-masing wilayah, sekaligus seberapa besar kekuasaan satu dua komunitas terhadap yang lain.

Pada saat ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan

seisi bumi serta akan menentukan sikap dasar untuk mengolahnya,⁴ maka pada saat itulah ideologi akan menentukan dan mendorong kita secara teknis melihat, menilai dan mengambil sikap. Robert Setio mengemukakan bahwasanya:

Ideologi menentukan cara kita menilai dan menentukan sesuatu. Perbedaan ideologi tentang tanah dan kepemilikannya apabila tidak disadari dapat memicu konflik yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebab bagaimana mungkin cara melihat (ideologi dalam arti yang luas) yang berbeda bisa digunakan untuk menilai cara menilai yang lain dan diharapkan bisa membuahkannya? Penting adalah memunculkan kesadaran untuk menerima kepelbedaan ideologi sebagai syarat utama untuk dialog, sehingga darinya atau setidaknya akan mengurangi potensi konflik dan bila memungkinkan dapat dikembangkan agar bisa membuahkannya diskusi yang saling memperkaya.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini dijelaskan sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Beberapa tahap yang ditempuh antara lain: (1) penulis meneliti fe-

nomena konflik ideologi tanah yang berlangsung di Porto dan Haria terkait dengan tanah *dati Hatuwasalo*, di mana masing-masing wilayah melegitimasi diri sebagai pemilik berdasarkan aspek kesejarahan (Haria: proses pemberian untuk menopang ekonomi keluarga karena relasi kawin-mawin, sedangkan masyarakat Porto berdasarkan aspek budaya hierarkis status patih sebagai raja dan latu sebagai bawahan); (2) melakukan eksplorasi, berupa penggalian informasi primer maupun sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶

Informasi yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui pemikiran Norman C. Habel dan Robert Setio terkait dengan ideologi Israel Kuno tentang tanah dalam Perjanjian Lama. Analisis dilakukan untuk mencari simpul kesamaan dan perbedaan antara konsep ideologi tanah dalam Perjanjian Lama, apakah memiliki korelasi dengan ideologi tanah dalam konteks Porto-Haria yang selama ini bergumul dengan konflik tanah *hatuwasalo*? Kemudian melakukan penawaran ideologi kenabian sebagai alternatif rekonsiliatif.

⁴ Nana Sutikna, "Ideologi Manusia Menurut Erich Fromm (Perpaduan Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Kritik Sosial Karl Marx)," *Jurnal Filsafat* 18, no. 2 (October 15, 2016): 205–22, <https://doi.org/10.22146/JF.3525>.

⁵ Robert Setio, "Ideologi Tentang Tanah, Kepemilikannya Dan Pengelolaannya," n.d., 1.

⁶ S. Nasution, *Metode Kualitatif Naturalistik* (Bandung: Tarsino, 1996), 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Ideologi Tanah dalam Perjanjian Lama

Habel mengkategorikan ideologi tanah dalam Perjanjian Lama ke dalam enam kategori. Bagi Habel, beragam ideologi dalam Perjanjian Lama selain memiliki karakteristik masing-masing. Ia juga menampilkan ciri masyarakat, atau bahkan kelompok tertentu entah itu berasal dari kalangan rakyat biasa maupun penguasa. Masing-masing ideologi memiliki kekuatan maupun kelemahannya masing-masing dan berpotensi memunculkan konflik jika ideologi tersebut tidak dikelola dengan baik. Setio menjelaskan bahwa ideologi adalah sarana pemikiran untuk mengantar dan menentukan bagaimana kita melihat dan menilai sesuatu. Bahwa dalam konteks tanah misalnya, perbedaan ideologi tentang tanah dan kepemilikannya jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memicu konflik yang sebenarnya tidak diperlukan, sebagaimana tergambar pada sejarah peradaban bangsa Israel dalam dialektikanya dengan tanah.⁷ Untuk itu diharapkan dari beberapa penjelasan Habel menjadi pengantar untuk mencermati dialektika ideologi tanah dalam konteks Porto-Haria yang bisa saja memiliki kemiripan.

⁷ Setio, "Ideologi Tentang Tanah, Kepemilikannya Dan Pengelolaannya."

Ideologi Kerajaan

Kesan kuat tentang ideologi Kerajaan termuat dalam kitab 1 Raja-Raja 3-10 dan Mazmur 2 dan 72.⁸ Kisah raja Salomo memperlihatkan pemberian mandat dari Tuhan untuk menguasai tanah. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga raja memiliki hak untuk mengatur tanah. Pada titik tertentu hal ini beririsan dengan pandangan bahwa tanah merupakan sumber ekonomi dan kekayaan. Karena itu, Salomo sebagai raja, berhasil menaklukkan wilayah sekitar dan menguasai tanah mereka, lalu menegaskan legitimasinya sebagai raja dengan sumber ekonomi dan kekayaan. Relasi antara Salomo dan Tuhan memperlihatkan rasa hormat yang kuat dari hamba yang patuh kepada tuannya melalui kebergantungannya kepada Tuhan (ia meminta dan membutuhkan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan) menjadi kekuatan Salomo untuk melegitimasi dirinya dan komunitas sosial sebagai penerima berkat. Kepercayaan bahwa hikmat dan pengetahuan adalah sumber berkat tercermin jelas dari sisi hidup raja Salomo.

Konteks ideologi yang menempatkan keberhasilan ekonomi sebagai tolak ukur kesuksesan akan berseberangan dengan konsep Deutronomik yang memperi-

⁸ Setio, 1-2.

ngatkan tentang kekayaan. Kisah Nabot (1 Raj. 21:1-16) memperlihatkan pergumulan dua ideologi yang berbeda, yakni ideologi nenek moyang, di mana dalam ideologi ini tanah dari warisan generasi terdahulu, atau milik sebuah keluarga secara turun temurun. Sedangkan dalam ideologi kerajaan, tanah dipegang sepenuhnya oleh raja dan diberikan kepada siap yang dikehendaknya.

Ideologi Teokratik

Dalam kitab Ulangan 4 – 11 (ay 12-26) memfokuskan pada hukum tanah yang mencirikan sisi teokratik. Dengan menempatkan Tuhan sebagai pemberi tanah, di mana segala hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan penguasaan tanah merupakan kewenangan mutlak Allah. YHWH digambarkan sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan atas bangsa-bangsa. Ia juga yang memberikan mandat kepada Israel berikut dengan ketentuan-ketentuannya untuk menguasai tanah Kanaan sebagai hadiah dan bukan karena hasil kerja dari Israel. Karena itu, tanah Kanaan dalam konteks ideologi teokrasi dilihat sebagai hadiah yang merupakan wujud janji Allah kepada nenek moyang Israel sekaligus memberi legitimasi kepada Israel untuk melakukan pendudukan tanah Kanaan.⁹ Atas dasar inilah Israel memasuki dan mendiami (menduduki) ta-

nah pemberian tersebut. Israel kemudian memusnahkan penduduk setempat.

Ada beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh Habel terkait ideologi teokratik. Pertama, kitab Ulangan secara eksplisit menjelaskan bahwa Israel memperoleh hak dari Tuhan untuk menggunakan tanah Kanaan, tetapi tidak untuk seterusnya. Hak tersebut sewaktu-waktu dapat di cabut oleh YHWH. Hal ini berbeda dengan bangsa Kanaan, yang secara otomatis tidak mendapatkan hak atas tanah yang mereka duduki selama ini.¹⁰ Dalam konteks ini, Israel diberi hak atas tanah yang selama ini diduduki oleh orang Kanan. Kedua, penunjukan kaum Lewi disinyalir sebagai langkah antisipasi untuk meredam persoalan hak atas tanah. Hal ini berangkat dari kesepakatan bahwa Lewi tidak akan mendapatkan pembagian tanah sebagaimana suku lainnya, dalam rangka memunculkan sikap adil dalam pembagian tanah, dengan mempertimbangkan tanah sebagai kepunyaan Tuhan dan bukan kepunyaan Israel. Ketiga, untuk orang asing dan perempuan tidak memiliki hak atas tanah dalam ideologi teokrasi. Besar kemungkinan pengaruh sistem patriarki sangat kuat. Namun, pemilik tanah dianjurkan untuk menghidupi para janda bahkan orang asing.

⁹ Setio, 4.

¹⁰ Setio.

Ideologi Nenek Moyang

Dalam kitab Yosua, tanah dibagikan kepada suku-suku/keluarga-keluarga (11:23; 19:49 dst) sesuai dengan perintah Musa yang kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh Yosua. Yosua sendiri mendapatkan tanah dari proses pendudukan terhadap kerajaan-kerajaan Kanaan lalu dibagikan kepada keluarga-keluarga Israel. Yosua dilukiskan sebagai seorang raja yang anti monarki. Ia tidak melakukan sentralisasi kekayaan melainkan memberikan kekuasaan kepada keluarga-keluarga untuk mengelola tanah.

Ideologi Kenabian

Secara spesifik ideologi kenabian tentang tanah digambarkan melalui kitab Yeremia. Melalui kitab ini, relasi antara tanah, Tuhan, dan orang Israel digagas dalam nuansa simbiosis. Tanah menjadi milik (*nachalah*) orang Israel dan Tuhan. Israel adalah *nachalah* Tuhan karena Ia sebagai umat kepunyaan. Sedangkan Tuhan merupakan *cheleq* (bagian) dari Israel (Yakub). Latar belakang munculnya relasi ini sebagai counter ideologi Baal yang mengklaim bahwa Baal-lah pemilik tanah. Relasi antara tanah, Tuhan, dan Israel itu selanjutnya juga digambarkan dalam metafora Israel sebagai

pengantin wanita, anak kesayangan, bahkan sebagai kebun pilihan. Metafor ini menunjukkan bahwa relasi antara Tuhan, Israel dan tanah cukup dekat. Namun, di saat yang sama, “kejatuhan” manusia juga digambarkan sebagai pencemaran (retaknya hubungan antara Tuhan, Israel dan tanah), sekaligus menyumbat jaring relasi kosmos untuk rantai kehidupan.¹¹

Kejatuhan Israel berkorelasi dengan pencemaran tanah. Tanah yang tandus digambarkan sebagai korban dari kejatuhan Israel. Namun demikian, kejatuhan Israel lantas tidak memisahkan relasi *nachalah* maupun *cheleq*. Babel dilibatkan dan digambarkan sebagai pihak yang dipakai Tuhan untuk memurnikan umat (tanah) dari pencemaran. Tanah diistirahatkan dari digarap (sabat) untuk memasuki harapan akan masa depan baru yang mencirikan komunitas relasi yang egalitarian, di mana Tuhan dapat berhubungan secara langsung dan akrab dengan semua kalangan yang ada dalam masyarakat Israel di suasana yang baru (perjanjian yang baru), Yeremia 31:31-34, di mana suasana kepelbadaan dan status sosial tetap ada. Keadaan digambarkan minim akan kerakusan yang membuat pendapatan yang tidak adil (6 :13), dan penekanan pada keberhasilan bukan tertuju pada status so-

¹¹ Joshtrom Izaac Kureethadam, *Creation in Crisis: Science, Ethics, Theology* (Marryknoll-New York: Orbis Books, n.d.), 4.

sial yang tinggi ataupun kekayaan segelintir orang melainkan pengetahuan akan Allah (9:22-23). Hal ini selaras dengan visi apokaliptik yang menekankan kemurnian agama, keadilan sosial, dan kemandirian politik. Bahwa kejatuhan manusia yang membawanya berkonflik dengan kosmos adalah bentuk dari penyimpangan agama, ketidakadilan sosial, dan dominasi imperialisme.¹²

Ideologi Agraris

Dalam Imamat 25-27 Allah digambarkan sebagai pemilik. Tuan tanah dan Israel adalah penyewa (istilah *gerim* dan *tosabim*, 25:23, sistem HGB – sewa). Israel digambarkan sebagai petani yang tidak memiliki hak milik atas tanah yang peruntukannya untuk pertanian. Ideologi tanah agraris ini juga memuat tentang tahun Yobel yang harus menjadi perhatian orang Israel. Tahun Yobel ini mempersilahkan petani kembali ke tanah miliknya (tetapi tidak dalam arti memiliki sebagaimana dalam ideologi teokratik). Konsep ini bertujuan untuk mengatur reforma agraria. Pertama, sabbat ditujukan pada tanah, di saat lain tanah harus kembali ke pemiliknya. Situasi ini berkaitan dengan konsep ketahanan pangan, di mana kesuburan tanah dan panen melimpah Israel tergantung pada relasi me-

reka dengan pemilik tanah, yaitu Tuhan. Tradisi reforma agraria sebagaimana tergambar dalam ideologi agraris ini pada sisi tertentu memberi ruang kekuasaan yang besar kepada para imam untuk proses pengelolaannya. Kecenderungan pengelolaan tanah oleh para imam untuk mengembangkan ekonomi mereka adalah situasi yang tidak terelakkan.

Ideologi Imigran

Abraham dipahami sebagai pihak yang menerima janji Allah atas tanah Kanaan. Namun apa yang dimengerti oleh Abraham tentang pemanggilannya ke tanah Kanaan berbeda dengan ideologi lain yang bernuansa invasi. Abraham lebih melihat bahwa keberadaannya di tanah Kanaan adalah sebagai seorang imigran. Dalam beberapa catatan yang diberikan oleh Habel, Abraham memperlihatkan sisi ideologi imigran terhadap tanah melalui: 1) pengakuan bahwa tanah itu sudah berpenghuni; 2) kisah Abraham membeli tanah untuk makam Sarah istrinya; 3) Abraham selalu bersedia berpartisipasi dalam keseharian hidup penduduk asli; 4) ideologi imigran sangat mengidealkan keluarga ketimbang kerajaan. Karena itu, dalam ideologi ini percapakan soal peran Abraham untuk menjadi

¹² Habel, *The Land Is Mine: Six Biblical Land Ideologies*, 10.

berkat atas bumi akan ditemukan. Abraham dinyatakan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya secara universal.

Ketidaknetralan Ideologi sebagai Pangkal Konflik

Pada satu sisi, ideologi yang bertitik pijak pada konsep *science of ideas*, sebagaimana yang dikembangkan oleh Tracy, pada hakekatnya memiliki keluwesan makna.¹³ Karena itu, pemaknaan terhadap ideologi pasti akan beragam. Soerjanto mengemukakan bahwa ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan nilai akan secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau suatu masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.¹⁴ Karena itu, ideologi pada titik tertentu juga dapat mendorong kita manusia untuk menentukan cara kita melihat dan menilai sesuatu. Dalam konflik tanah, perbedaan ideologi tentang tanah dan kepemilikannya apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik. Oleh karena itu, kesadaran untuk menerima perbedaan ideologi nampaknya merupakan aspek yang harus dikembangkan melalui diskusi dan dialog.

Konflik antara negeri Porto dan Haria atas tanah *dati Hatuwasalo* menurut

saya sangat erat kaitannya dengan ketidaknetralan sudut pandang atau ideologi tentang tanah dari dua komunitas masyarakat yang terbentuk bahkan dalam kurun waktu yang lama. Ideologi itu pada waktunya saling berhadap-hadapan satu dengan yang lain dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat tertentu dan dalam wujud praktisnya terwujud melalui konflik komunal.

Penekanan ketidaknetralan ideologi masing-masing negeri tercermin melalui anggapan orang Haria yang banyak berpendapat bahwa tanah *dati hatuwasalo* yang dikuasai oleh marga Nanlohy adalah tanah yang sebagaimana dalam konsep ideologi agraris di atas. Mereka bukanlah orang asing dan pendatang di tanah itu, tetapi mereka adalah penduduk tetap namun hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik (band. Im. 25 – 27, Tuhan adalah pemilik/tuan tanah). Hal ini senada dengan cerita orang Haria bahwa anak perempuan Haria bermarga Loupatty kawin dengan anak laki-laki Porto bermarga Nanlohy lalu diberikanlah area tanah *dati hatuwasalo* untuk digarap sebagai sumber ekonomi mereka saat itu. Dalam fakta yang lebih formal tergambar melalui pertemuan Muspida dengan ke-

¹³ Sutikna, "Ideologi Manusia Menurut Erich Fromm (Perpaduan Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Kritik Sosial Karl Marx)."

¹⁴ Soerjanto Poespowardjojo, "Kesadaran Budaya Dan Religius Sebagai Konteks Struktural Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan," in *KIPNAS III* (Jakarta: LIPI, n.d.), 207.

dua komunitas masyarakat dalam proses rekonsiliasi atas konflik komunal. Ada beberapa butir pernyataan yang dibacakan dalam forum tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ideologi masyarakat Porto-Haria tentang tanah *dati hatuwasalo*.

Keluarga Loupatty, yang mengatakan bahwa leluhur mereka memberikan hak pakai kepada keluarga Nanlohy (Porto) yang kawin dengan saudara perempuan Loupatty (Haria). Oleh sebab itu seluruh komponen dan masyarakat negeri Haria tetap mempersilahkan masyarakat negeri Porto untuk mengambil air bersih “milik” negeri Haria di wilayah pertuanan Negeri Haria (air raja) sebagai bagian dari tanggung jawab social bersama. Menanggapi hal ini, mantan raja Porto (John Apono) menyodoran bukti bahwa Porto memiliki hak pusaka atas sumber air tersebut, bahkan semenjak tahun 1897. Masyarakat Porto melihat bahwa seharusnya mereka pada posisi untuk memiliki tanah *dati*. Dalam hal ini negeri Porto memiliki pandangan ideologi tanah layaknya ideologi kerajaan di Perjanjian Lama.

Pertanyaan besar kini ada di depan kita adalah: bagaimana ketidaknetralan ideologi (termasuk ideologi tanah) bermain di ruang publik, sebagaimana topik yang saya

kemukakan diatas dapat dibenarkan? Soerjanto memberikan rumusan umum tentang ideologi sebagai “kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya secara bebas.” Destutt de Tracy menyatakan bahwa ideologi memiliki keluwesan makna memungkinkan munculnya kompleksitas pengetahuan dan nilai dari seseorang atau sekelompok masyarakat tanpa dapat dikendalikan siapapun.¹⁵ Dengan demikian, rumusan umum ideologi ini memberi ruang bebas terhadap munculnya penafsiran atau pemahaman terhadap sebuah kenyataan secara liar dan membabi buta bila itu disandingkan dengan kepentingan, entahkah itu kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan dll, seseorang atau sekelompok masyarakat, dan di sinilah ketidaknetralan ideologi itu bermain di ruang publik.

Ideologi (tanah) yang dibangun, baik dalam dunia Perjanjian Lama sebagaimana yang dikemukakan oleh Habel, sekarang ini tetap muncul dan melalui proses panjang. Ideologi ini tidak dibangun dalam waktu sekejap. Ia dibangun melalui proses ideologisasi yang melibatkan berbagai pengalaman, pendidikan, dan politik. Ideologi

¹⁵ Emmet Kennedy, “‘Ideology’ from Destutt De Tracy to Marx,” *Journal of the History of Ideas* 40,

no. 3 (July 1979): 353–68, <https://doi.org/10.2307/2709242>.

juga ditanamkan melalui kekuasaan, dan ketidaknetralan ideologi juga akan berjalan beririsan dengan pengalaman pendidikan, politik maupun kekuasaan. Dalam lingkaran ini dominasi ideologi yang satu terhadap yang lain juga menjadi masalah dan ancaman karena dominasi ideologi lambat laun akan membuat orang beranggapan bahwa apa yang dipahaminya merupakan satu satunya pemahaman yang ada dan benar.

Ideologi Kenabian sebagai Alternatif Rekonsiliatif

Kita sepakat bahwa ideologi memiliki ruang bebas makna yang bisa terkendali maupun tidak. Kendati demikian, kita juga memiliki ruang bebas untuk menampilkan sisi netralitas dari sebuah ideologi, termasuk ideologi tanah untuk mencegah menguatnya dominasi ideologi tertentu. Dalam konteks problematika ideologi tanah pada masyarakat Israel kuno, masing-masing ideologi muncul untuk mewakili kepentingan seseorang atau sekelompok masyarakat tanpa mempedulikan sisi netralitasnya. Berbeda dengan ideologi lain, ideologi kenabian tentang tanah dalam tradisi Israel memperlihatkan hubungan kausalitas antara tanah, Tuhan, dan Israel (umat). Ideologi kenabian tentang tanah sebagaimana yang diekspresikan oleh Yeremia, kendati memiliki nuansa ekologis, namun juga mencerminkan relasi teologis dengan metafor teo-

sentris (Kosmos/Kristos-sentris) yang ditampilkan secara implisit melalui gambaran relasi simbiotik antara tanah sebagai *nachalah* (kepunyaan) orang Israel (17:4), tanah juga sebagai *nachalah* Tuhan (2:7), dan Tuhan sebagai *cheleq* (bagian) dari Israel (kosmos).

Ideologi kenabian tentang tanah dalam tradisi Israel, sebagaimana yang digambarkan oleh Norman Habel, mengekspresikan sisi netralitasnya melalui relasi simbiosis antara Tuhan, Israel, dan tanah. Ideologi ini berbeda dengan ideologi lain dalam dunia PL yang menurut saya kurang menampilkan sisi netralitasnya. Relasi tanah sebagai *nachalah* orang Israel, dan *nachalah* Tuhan (Yer. 17:4), dan Tuhan merupakan *cheleq* Israel mencerminkan pandangan tentang kesetaraan, pengakuan, penerimaan, keadilan, kesamaan hak, tetapi dengan tegas juga memosisikan Tuhan sebagai pemilik (*cheleq*) tanah maupun manusia (Israel sebagai metafor).

Konflik tanah berlatar ideologi yang terjadi di Porto dan Haria memberi catatan kepada kita bahwa perbedaan ideologi tentang tanah merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dalam ruang sosial, tetapi bisa diminimalisir. Apa yang terjadi dalam dunia Perjanjian Lama menunjukkan bahwa kepelbedaan ideologi selain terjadi karena adanya proses ideologisasi yang

melibatkan berbagai pengalaman, pendidikan, politik dan kekuasaan, bila dikelola dalam sebuah dialog yang korelasional (dialog yang dilakukan dengan prinsip keadilan; bahwa apa yang menjadi latar belakang atau identitas dan kepentingan harus ditanggalkan),¹⁶ dapat berpotensi memunculkan relasi saling memiliki, saling butuh, saling menerima untuk kehidupan bersama.

Kenapa demikian? Karena ideologi sebagaimana prinsip utamanya, seperti yang dikemukakan oleh Sastrapratedja, merupakan hasil refleksi manusia berdasarkan kemampuannya mengambil jarak dengan kehidupan. Dan karena itu, ideologi mengandung unsur, pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan; kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau preskripsi moral; dan ketiga, ideologi menuntut orientasi pada tindakan. Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai yang termuat di dalamnya,¹⁷ maka kepelbedaan ideologi tidak akan selamanya menjadi batu sandungan untuk sebuah kerukunan dan kedamaian. Namun bila atas kesadaran masyarakat komunal untuk masuk dalam semangat dialog yang korelasional dengan menampil-

kan substansi dan unsur nilai positif dalam ideologi itu sendiri, maka konflik yang tidak perlu bisa dihindari atau paling kurang terminimalisir.

Sebuah ideologi alternatif sebagai tawaran untuk mempertimbangkan dialog yang korelasional dalam suasana konflik Porto dan Haria berangkat dari cara pandang ideologi kenabian. Mengapa ideologi kenabian saya tawarkan dalam konteks konflik Porto-Haria? Paling kurang ada dua nilai yang menurut saya menunjukkan keneutralitas dari ideologi itu. Pertama, ideologi kenabian memandang relasi Allah, tanah, dan Israel (umat) dalam konteks simbiosis mutualis. Kedua, ideologi kenabian yang menekankan relasi tanah dan Israel dalam relasi kesetaraan.

Sisi positif dari relasi mutualis peneakanannya pada pertukaran atau hubungan saling menguntungkan antar elemen sosial. Menurut Blau, dalam *Social Exchange Theory*, pertukaran atau hubungan saling menguntungkan menitikberatkan pada upaya pembentukan pertalian pertemanan bagi pihak-pihak yang saling membuat persetujuan, baik pada strata (lapisan) yang sama maupun pada strata yang berbeda.¹⁸ Hal ini

¹⁶ Paul F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 217.

¹⁷ M. Sastrapratedja, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat*,

Berbangsa Dan Bernegara (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), 142.

¹⁸ Peter M. Blau, "Social Exchange Theory," in *Hand Book of Social Psychology*, ed. Keren S. Cook and Eric Rice, 2013, 61-88.

bila dihubungkan dengan gagasan *nachalah* dan *cheleq* tanah, Tuhan dan Israel (umat), maka akan ditemukan suasana seperti itu.

Kecenderungan masyarakat Porto-Haria membangun ideologi tanah dari gagasan ideologi teokratik dan mungkin ideologi nenek moyang-rumah tangga memiliki kecenderungan ketidaknetralan. Penekanan begitu dominan diarahkan pada perintah yang telah dititahkan oleh nenek moyang maupun oleh raja. Begitu raja berada pada posisi tidak adil, maka konflik menjadi hal yang tidak terhindarkan. Begitu juga dengan ideologi nenek moyang yang sangat menekankan peran dan pesan leluhur untuk menjaga tanah. Kisah Kaleb yang mengklaim haknya atas tanah dan kemudian menaklukkan para raksasa penghuni tanah yang diklaim merupakan wujud kegigihan dalam mencapai visi pendudukan total atas tanah Kanaan.

KESIMPULAN

Konflik tanah seringkali tanpa disadari berangkat dari perbedaan cara pandang masing-masing pihak yang berkonflik terhadap bagaimana tanah tersebut dimiliki. Inilah yang disebut sebagai ideologi tanah. Tentu saja masing-masing pihak akan memiliki argumentasi masing-masing untuk mendukung pandangan ideologis tersebut. Untuk menengahi konflik ideologis tanah, diperlukan ideologi lainnya yang lebih da-

pat diterima kedua belah pihak yang berkonflik sebagai ideologi alternatif. Dalam konflik masyarakat Porto-Haria, ideologi kenabian dapat menjadi ideologi alternatif oleh karena menekankan pada relasi simbiotik antara tanah, umat, dan Tuhan. Tanah tidak lagi dianggap sebagai milik kelompok tertentu berdasarkan kepemilikan turun temurun, namun lebih kepada bagaimana tanah tersebut dipandang sebagai milik Tuhan bagi kebaikan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya memberikan apresiasi yang besar terhadap penulis kedua, ketiga, dan keempat, yang namanya disebutkan di artikel ini, atas masukan, saran, dan koreksi yang diberikan dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Syamsuddin, Susi Fitria Dewi, and Junaidi Indrawadi. "Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendetang Vs Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (October 18, 2019): 131–50. <https://doi.org/10.14421/JSR.V14I1.1702>.
- Blau, Peter M. "Social Exchange Theory." In *Hand Book of Social Psychology*, edited by Keren S. Cook and Eric Rice, 2013.
- Habel, Norman C. *The Land Is Mine: Six Biblical Land Ideologies*. Fortress Press, 1995.
- Kennedy, Emmet. "'Ideology' from Destutt De Tracy to Marx." *Journal of the*

- History of Ideas* 40, no. 3 (July 1979): 353–68. <https://doi.org/10.2307/2709242>.
- Knitter, Paul F. *Satu Bumi Banyak Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Kureethadam, Joshtrom Izaac. *Creation in Crisis: Science, Ethichs, Theology*. Marryknoll-New York: Orbis Books, n.d.
- Nasution, S. *Metode Kualitatif Naturalistik*. Bandung: Tarsino, 1996.
- Poespowardjojo, Soerjanto. “Kesadaran Budaya Dan Religius Sebagai Konteks Struktural Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan.” In *KIPNAS III*. Jakarta: LIPI, n.d.
- Sastrapratedja, M. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Bidang Kehidupan Bermsyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Setio, Robert. “Ideologi Tentang Tanah, Kepemilikannya Dan Pengelolaannya,” n.d.
- Sutikna, Nana. “Ideologi Manusia Menurut Erich Fromm (Perpaduan Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Kritik Sosial Karl Marx).” *Jurnal Filsafat* 18, no. 2 (October 15, 2016): 205–22. <https://doi.org/10.22146/JF.3525>.